

LAMPIRAN

Lampiran. 1 Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG

Narasumber : Eka Rachmat Hartawan, S.E
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan (Pelaksana Kebijakan)
Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Hari/Tanggal : 30 Januari 2026
Lokasi : Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang

PERTANYAAN	JAWABAN
Jika kita meninjau kembali tujuan awal dari Peraturan Wali Kota mengenai Program Tangerang Cerdas, sejauh mana Bapak menilai efektivitas implementasi program ini dalam mencapai target utamanya, khususnya dalam menekan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kota Tangerang?	Efektivitasnya jelas, mba. Angka putus sekolah di tingkat SMP memang terkendali, dan di pos anggaran kami, dana ini terserap hampir 100% untuk bansos pendidikan. Terlihat secara signifikan itu terhadap berkurang secara drastis terkait dengan keluhan orang tua pada permasalahan bayar ini itu di awal tahun ajaran. Ini merupakan salah satu indikator keberhasilan yang paling nyata bagi kami.
Terkait dengan data realisasi tahun 2025, kami melihat adanya konsistensi jumlah penerima manfaat di jenjang SD dan SMP yang mencapai ribuan siswa. Bagaimana Bapak menjelaskan korelasi antara penyerapan anggaran yang maksimal tersebut dengan kualitas keberlangsungan pendidikan para siswa dari keluarga kurang mampu?	Penyerapan anggaran yang hampir mencapai 100% itu bukan sekadar angka administratif bagi kami di Bidang Perencanaan. Itu artinya, bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Dana sebesar 80 ribu untuk SD dan 100 ribu untuk SMP per bulan itu mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, tapi bagi keluarga sasaran kita, itu adalah penentu apakah anak mereka bisa punya buku tulis baru atau tidak. Jadi korelasi utamanya adalah pada keberlanjutan. Siswa tidak lagi terhambat oleh biaya operasional harian yang sifatnya mendesak.
Dalam riset ini, saya menemukan bahwa program difokuskan pada jenjang SD dan SMP. Mengapa perencanaan kebijakan ini lebih menitikberatkan pada dua jenjang tersebut dan bagaimana Bapak memastikan bahwa distribusi sasaran tetap berada pada koridor program kualitatif yang tepat	Fokus kita memang di SD dan SMP karena itu adalah pondasi wajib belajar sembilan tahun yang menjadi kewenangan langsung pemerintah kota. Untuk memastikan tepat sasaran, kami tidak bergerak sendiri. Kami melakukan sinkronisasi data melalui sistem Simpodik yang dicocokkan dengan

sasaran?	data kemiskinan dari Dinas Sosial. Evaluasi kualitatif kami lakukan lewat monitoring ke sekolah-sekolah untuk melihat apakah ada siswa yang seharusnya dapat tapi belum terdata, atau sebaliknya. Kami ingin memastikan tidak ada <i>exclusion error</i> yang fatal di lapangan.
Mengenai mekanisme pengawasan, bagaimana Dinas Pendidikan melakukan monitoring berkala terhadap penggunaan bantuan ini, dan sejauh mana Bapak melihat responsivitas pihak sekolah dalam mendukung kelancaran administrasi Program Tangerang Cerdas ini?	Monitoring kami lakukan secara berjenjang. Setiap semester kami melakukan verifikasi ulang data rekening dan status aktif siswa. Pihak sekolah sejauh ini sangat kooperatif karena mereka yang paling tahu kondisi siswa di kelas. Meskipun terkadang ada kendala teknis dalam validasi NIK di bank, kami selalu membuka kanal koordinasi agar masalah tersebut tidak berlarut-larut. Responsivitas kami dalam menanggapi keluhan orang tua juga terus ditingkatkan melalui tim helpdesk agar kepercayaan masyarakat terhadap program ini tetap terjaga dengan baik.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN SMP NEGERI 5 KOTA TANGERANG

Narasumber : Juahiriyah, S.Pd
 Jabatan : Guru SMP Negeri 5 Kota Tangerang
 Hari/Tanggal : 30 Januari 2026
 Lokasi : SMP Negeri 5 Kota Tangerang

PERTANYAAN	JAWABAN
Berdasarkan pengalaman Ibu sehari-hari di dalam kelas dan interaksi langsung dengan peserta didik, bagaimana Ibu mengamati dampak konkret yang muncul pada siswa, terutama dalam meminimalisir hambatan-hambatan teknis yang selama ini sering membuat mereka terpaksa absen atau tertinggal dalam pelajaran sebelum adanya Program Tangerang Cerdas ini?	Bagi kami para guru, Program Cerdas ini sangat membantu. Siswa yang tadinya sering izin tidak masuk karena tidak punya uang beli buku atau bayar ujian jadi mereka bisa lebih fokus. Uang bantuan itu, ya, digunakan untuk kebutuhan sekolah yang sifatnya mendadak, seperti membeli buku tulis, alat tulis, atau bahkan membayar biaya ujian. Dengan adanya bantuan ini, kehadiran siswa meningkat secara signifikan, dan yang lebih penting, mereka jadi tidak malu lagi saat mengikuti kegiatan belajar karena bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.
Jika kita melihat lebih jauh ke aspek psikologis dan keterlibatan siswa di sekolah, apakah Ibu merasakan adanya transformasi dalam hal kepercayaan diri atau perubahan perilaku belajar yang signifikan pada anak-anak penerima manfaat ini dibandingkan dengan periode sebelum program ini diimplementasikan secara luas?	Sebelum program ini berjalan, beberapa siswa cenderung pasif atau sering terlambat menyerahkan tugas karena masalah finansial di rumah. Sekarang, mereka lebih aktif, lebih percaya diri, dan lebih termotivasi untuk belajar. Bahkan beberapa orang tua pun melaporkan bahwa anak-anak mereka pulang dengan semangat belajar yang lebih tinggi karena merasa diperhatikan.
Dalam konteks efisiensi waktu, Ibu tadi sempat menyebutkan bahwa dana sering kali cair setelah semester berjalan. Bagaimana Ibu sebagai guru menyikapi kondisi di mana siswa sangat membutuhkan perlengkapan di awal semester, namun dana bantuan baru tersedia di tengah jalan? Apakah hal ini mempengaruhi konsentrasi mereka di kelas?	Di kelas kami, ada beberapa siswa yang tidak bisa membeli buku tulis atau membayar biaya ujian tepat waktu karena dana bantuan telat cair. Hal ini membuat mereka merasa cemas, dan beberapa di antaranya sempat meminta izin tidak masuk sekolah. Padahal, jika bantuan diterima lebih awal, mereka bisa lebih fokus dan tidak perlu khawatir soal biaya. Kami menyadari bahwa efisiensi waktu sama pentingnya dengan efisiensi anggaran, karena pada akhirnya yang terdampak adalah kesiapan siswa mengikuti kegiatan belajar.
Terkait aspek kecukupan, dengan nominal	Dari sisi sekolah, kami melihat bantuan ini

bantuan Rp100.000 per bulan untuk jenjang SMP, menurut sudut pandang Ibu sebagai guru yang memahami kebutuhan praktik dan kebutuhan akademik lainnya, sejauh mana nominal tersebut mampu menutup kebutuhan riil siswa saat ini, terutama untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak?	cukup signifikan untuk kebutuhan dasar siswa, tapi tentu ada keterbatasan. Siswa yang membutuhkan biaya praktik laboratorium atau alat musik misalnya, tetap harus mencari tambahan dari sumber lain. Jadi bantuan ini bukan solusi total, tapi cukup untuk memastikan siswa tidak putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya wajib. Ya, dengan ini kami berharap pemerintah bisa mempertimbangkan penyesuaian nominal bantuan berdasarkan jenjang dan kebutuhan aktual siswa.
Sebagai penutup, bagaimana Ibu melihat peran pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman bagi para guru untuk terus mendorong siswa agar tidak putus sekolah melalui dukungan program Tangerang Cerdas ini?	Kami merasa lebih tenang dalam mengajar karena ada jaminan bagi siswa yang benar-benar tidak mampu. Tugas kami memotivasi mereka menjadi lebih ringan karena hambatan utamanya, yaitu biaya, sudah ada solusinya. Ini membuat iklim belajar di SMP Negeri 5 menjadi lebih positif dan kompetitif tanpa harus terbebani rasa minder akibat kekurangan fasilitas sekolah.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN ORANG TUA SISWA PENERIMA PROGRAM

Narasumber : Wusti
 Jabatan : Orang Tua Siswa SMP Negeri 5 Kota Tangerang
 Hari/Tanggal : 30 Januari 2026
 Lokasi : SMP Negeri 5 Kota Tangerang

PERTANYAAN	JAWABAN
Bisa Ibu ceritakan lebih jauh mengenai kondisi sebelum keluarga Ibu mendapatkan bantuan Program Tangerang Cerdas ini, terutama bagaimana Ibu mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak di tengah keterbatasan gaji yang ada, dan perubahan apa yang paling Ibu rasakan setelah bantuan tersebut cair?	Sebelumnya, saya sering khawatir anak saya tidak bisa membeli buku atau seragam baru karena gaji saya tidak mencukupi. Setelah menerima bantuan dari Program Tangerang Cerdas, saya bisa merasa lega. Anak saya sekarang rutin sekolah, tidak lagi mengeluh soal biaya. Bahkan saya bisa menabung sedikit dari bantuan itu untuk kebutuhan lain. Program ini benar-benar meringankan beban kami sebagai orang tua.
Terkait dengan besaran dana bantuan sebesar Rp100.000 per bulan yang Ibu terima untuk jenjang SMP, jika dibandingkan dengan kebutuhan nyata anak di sekolah seperti biaya praktik, peralatan sekolah, hingga kebutuhan digital seperti kuota internet, bagaimana Ibu menilai kecukupan dana tersebut dalam menopang seluruh operasional sekolah anak dalam satu tahun ajaran?	Kalau dibilang sangat membantu, ya, sangat membantu, mba. Uang itu bisa dipakai buat beli seragam, bayar biaya praktik, atau beli kuota internet anak yang sekarang juga penting. Tapi kalau dibilang cukup untuk setahun? Belum, ya, mba. Apalagi kalau anak sudah masuk SMP, biaya alat-alat praktik itu mahal sekali. Bantuan itu hanya menutup setengahnya saja. Kadang kami tetap harus menambah sendiri supaya anak bisa mengikuti semua kegiatan sekolah dengan lancar.
Dalam riset saya, ditemukan adanya keterlambatan pencairan dana hingga beberapa minggu dari jadwal semester. Bagaimana hal ini mempengaruhi Ibu dalam mengelola ekspektasi dan kebutuhan mendesak anak di awal sekolah, dan apakah kondisi ini pernah memaksa Ibu untuk mencari pinjaman atau alternatif dana lain?	Bantuan dari Program Tangerang Cerdas sangat membantu, tetapi jika cairnya telat, kami jadi harus mencari alternatif sendiri dulu. Kadang harus meminjam uang atau menunda pembelian kebutuhan sekolah anak. Rasanya seperti ada beban tambahan, karena bantuan yang seharusnya meringankan justru baru terasa ketika kebutuhan sudah mendesak. Kami berharap tahun depan prosesnya lebih cepat, karena itu akan sangat membantu bagi keluarga seperti kami yang benar-benar mengandalkan bantuan ini.
Mengenai ketepatan sasaran, apakah Ibu sering mendengar atau melihat di lingkungan sekitar Ibu masih ada warga yang secara ekonomi sulit namun belum terdaftar, dan	Kadang saya heran, tetangga saya yang punya usaha lebih besar tetap dapat bantuan, sementara kami yang benar-benar kesulitan tidak masuk daftar. Ini

bagaimana perasaan Ibu melihat adanya anggapan bahwa sistem pendataan bantuan ini terkadang masih perlu diperbaiki agar lebih adil atau merata?	membuat saya sedikit kecewa, karena bantuan seharusnya tepat sasaran. Anak saya tetap sekolah, tapi kadang harus menunda beli buku atau seragam karena menunggu bantuan berikutnya. Kami berharap pemerintah lebih teliti dalam mendata.
Terakhir, apa harapan terbesar Ibu kepada Pemerintah Kota Tangerang terkait keberlanjutan program ini, terutama agar beban mental Ibu sebagai orang tua dalam memastikan anak tetap sekolah tidak lagi terganggu oleh masalah-masalah administratif atau keterlambatan dana di masa depan?	Harapannya ya kalau bisa bantuannya ditambah sedikit jumlahnya karena anak SMP kebutuhannya banyak sekali. Terus yang paling penting pencairannya jangan telat-telat, kalau bisa pas baru masuk sekolah uangnya sudah ada. Kami ingin anak kami sekolah terus sampai tinggi, jadi dukungan dari pemerintah lewat program seperti ini sangat kami butuhkan biar anak-anak tidak putus sekolah cuma karena masalah biaya.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN SMP NEGERI 5 KOTA TANGERANG

Narasumber : Mohamad Isdarmanto

Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Tangerang
 Hari/Tanggal : 30 Januari 2026
 Lokasi : SMP Negeri 5 Kota Tangerang

PERTANYAAN	JAWABAN
Terkait dengan pelaksanaan Program Tangerang Cerdas di lingkungan SMP Negeri 5, bagaimana Bapak menilai korelasi antara alokasi anggaran yang sudah tepat sasaran dengan efisiensi waktu penyaluran dana tersebut, terutama jika kita melihat urgensi kebutuhan siswa pada awal semester baru?	Kalau efisiensi dana sih relatif baik, hampir semua bantuan benar-benar sampai ke masyarakat sesuai sasaran. Tapi masalah terbesar ada pada efisiensi waktu. Kami di sekolah sering mendapat tekanan dari orang tua yang menanyakan kapan dana akan cair. Dari sisi sekolah, semua dokumen sudah lengkap, penetapan dari Dinas Pendidikan sudah selesai, tapi ternyata proses verifikasi di bank dan update data di pusat yang memakan waktu. Bayangkan, siswa sudah masuk semester baru, buku dan seragam sudah harus dibeli, tetapi dana baru cair dua bulan kemudian.
Dengan adanya keterlambatan sekitar dua bulan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana pihak sekolah mengelola keluhan atau tekanan dari orang tua siswa, dan apakah hal tersebut berpengaruh terhadap kelancaran administrasi sekolah atau bahkan kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar?	Ini menyebabkan manfaat bantuan terasa terlambat, dan orang tua kadang bingung bagaimana memenuhi kebutuhan sekolah anak mereka. Banyak orang tua yang mengeluh, terutama mereka yang anaknya baru masuk sekolah atau yang mengalami kendala ekonomi. Kami sebagai guru juga merasa prihatin karena bantuan yang seharusnya memudahkan kini baru bisa diterima ketika kebutuhan itu sudah mendesak. Sekolah sering kali harus menjadi "penengah" untuk menjelaskan birokrasi yang sebenarnya di luar kendali kami.
Dalam konteks koordinasi teknis, menurut pengamatan Bapak, pada bagian mana hambatan administratif yang paling signifikan terjadi sehingga proses verifikasi di tingkat perbankan atau pemutakhiran data di pusat memakan waktu yang cukup lama?	Kendala utamanya adalah sinkronisasi data yang tidak <i>real-time</i> . Meski dari sekolah dokumen sudah beres, saat data masuk ke sistem perbankan atau pusat, sering kali terjadi proses validasi ulang yang panjang. Jika ada satu saja ketidaksesuaian data NIK atau nomor rekening, prosesnya bisa mandek. Seharusnya ada sistem yang lebih terintegrasi antara Dinas Pendidikan, Disdukcapil, dan pihak bank agar aliran dana ini bisa secepat instruksi yang diberikan oleh pemerintah kota.
Sebagai kepala sekolah yang berhadapan langsung dengan realitas lapangan, apa dampak psikologis atau sosial yang Bapak lihat muncul di antara wali murid ketika	Tekanan psikologisnya sangat terasa, mba. Orang tua jadi merasa tidak pasti, bahkan ada yang ragu untuk membelikan kebutuhan sekolah anak karena uangnya belum ada.

ekspektasi mereka terhadap bantuan tepat waktu ini tidak terpenuhi di awal tahun ajaran?	Hal ini menciptakan beban pikiran tambahan bagi mereka. Kami di sekolah terus memberikan pengertian bahwa dana pasti cair, hanya saja butuh waktu. Namun, bagi keluarga yang benar-benar tidak mampu, waktu satu atau dua bulan itu sangatlah lama dan krusial bagi pendidikan anak mereka.
Terakhir, apa rekomendasi atau harapan Bapak kepada pihak pengelola kebijakan di tingkat Kota agar manajemen waktu penyaluran dana Tangerang Cerdas ini bisa diperbaiki, sehingga efisiensi program benar-benar dirasakan secara maksimal oleh sekolah dan siswa?	Harapan kami adalah digitalisasi yang lebih menyeluruh. Kalau bisa, proses verifikasi itu sudah selesai sebelum semester baru dimulai. Integrasi data antar-dinas harus diperkuat agar tidak ada lagi validasi manual yang memakan waktu sehari-hari di bank. Jika dana cair tepat waktu, saya yakin efektivitas program ini akan meningkat jauh, karena siswa bisa memulai hari pertama sekolah dengan perlengkapan yang lengkap tanpa rasa cemas dari orang tua mereka.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Narasumber : Wessa Triawan, SE, M.Ec.Dev
 Jabatan : Staf Tim Kerja Bidang Sosial Bappeda Kota Tangerang
 Hari/Tanggal : 30 Januari 2026
 Lokasi : Kantor Bappeda Kota Tangerang

PERTANYAAN	JAWABAN
Dalam konteks evaluasi kebijakan, aspek pemerataan sangat bergantung pada validitas basis data. Sejauh mana Bappeda memastikan bahwa mekanisme pemutakhiran data yang digunakan saat ini telah mampu meminimalisir kesalahan sasaran, dan bagaimana Bapak menanggapi fakta bahwa masih ada kelompok rentan yang belum terakomodasi dalam Program Tangerang Cerdas ini?	Untuk di Bappeda sendiri, kami sudah berupaya maksimal untuk menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru, tapi proses pemutakhiran data di lapangan itu lambat. Ada rumah tangga miskin baru yang belum terdata, sehingga otomatis mereka terlewat dari Program Tangerang Cerdas. Kadang kami harus melakukan verifikasi manual ke kelurahan atau RT/RW, dan ini memakan waktu cukup lama. Sementara di sisi lain, data dari pusat juga tidak selalu update tepat waktu.
Terkait kendala sinkronisasi data yang Bapak sebutkan tadi, apakah ada faktor birokrasi tertentu atau hambatan koordinasi teknis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang menyebabkan selisih data ini terus terjadi, sehingga pada akhirnya berdampak pada ketidakadilan distribusi bantuan di mata masyarakat?	Temuan ini mengindikasikan bahwa permasalahan pemerataan Program Tangerang Cerdas tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya implementasi di tingkat sekolah, melainkan oleh ketidaksinkronan dan keterlambatan pembaruan data antar instansi. Akibatnya, bantuan pendidikan tidak sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling rentan secara sosial dan ekonomi, sehingga tujuan kebijakan untuk menciptakan keadilan dalam akses pendidikan masih terhambat oleh persoalan administratif dan koordinasi data.
Jika kita melihat adanya ketegangan sosial di lingkungan sekolah—di mana ada orang tua siswa yang mampu justru mendapat bantuan sementara yang tidak mampu justru terlewat—menurut Bapak, sejauh mana verifikasi manual di tingkat kelurahan dan RT/RW bisa menjadi solusi efektif untuk menambal celah kekurangan data dari pemerintah pusat tersebut?	Verifikasi manual itu sebenarnya langkah "jemput bola" kami. Namun, masalahnya adalah beban kerja di lapangan dan mobilitas penduduk yang tinggi. Seringkali data dari pusat juga tidak selalu <i>update</i> tepat waktu dengan kondisi riil di gang-gang sempit Kota Tangerang. Jadi, meskipun kami berusaha, tetapi selalu ada selisih antara sasaran yang ideal dan realisasi di lapangan. Kami menyadari ini memicu ketidakpuasan, itulah mengapa sinkronisasi data ini menjadi prioritas evaluasi kami ke depan.
Bagaimana Bappeda memposisikan integrasi sistem data antar-dinas (seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan) dalam perencanaan tahun depan, agar kasus <i>inclusion</i> dan <i>exclusion error</i> ini tidak lagi menjadi hambatan utama dalam mencapai target pemerataan Program Tangerang Cerdas?	Strategi perbaikan kami ke depan adalah memperkuat integrasi sistem data agar pemutakhiran data kemiskinan dapat dilakukan secara <i>real-time</i>. Kami mendorong pelibatan sekolah, RT/RW, dan kelurahan lebih aktif dalam proses verifikasi awal. Tujuannya agar distribusi bantuan tidak hanya lebih adil secara

	kuantitas, tetapi juga lebih akurat secara kualitas sesuai kondisi sosial ekonomi keluarga penerima yang sebenarnya.
Terakhir, apakah ada rencana pengembangan sistem pemantauan atau dashboard monitoring yang dapat diakses antar-lembaga guna mempercepat responsivitas pemerintah daerah dalam mendeteksi warga miskin baru yang seharusnya segera masuk dalam daftar penerima bantuan pendidikan ini?	Betul, itu sedang dalam tahap pengembangan. Kami ingin ada transparansi dan akses data yang lebih cair antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dengan adanya sistem pengaduan dan monitoring publik yang lebih baik, kami berharap setiap keluhan mengenai ketidakmerataan data bisa langsung terdeteksi dan diverifikasi secara faktual tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang dari pusat.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG

Narasumber : Euis Siti Safaah
 Jabatan : Staf Helpdesk Dinas Pendidikan Kota Tangerang
 Hari/Tanggal : 30 Januari 2026
 Lokasi : Gedung Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tangerang

PERTANYAAN	JAWABAN
------------	---------

Berdasarkan posisi Ibu sebagai garda terdepan dalam menerima aspirasi masyarakat, bisa Ibu jelaskan bagaimana standar operasional prosedur (SOP) yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dalam merespons berbagai pengaduan yang masuk, baik itu yang bersifat informatif maupun keluhan teknis terkait kendala di lapangan?	Kalau sekadar menanyakan prosedur pendaftaran atau persyaratan administrasi, kami bisa langsung jawab di tempat. Tapi kalau pertanyaannya soal kenapa dana belum cair atau data anak tidak masuk sistem, kami harus cek ke sekolah, kemudian koordinasi dengan bagian keuangan, dan terkadang juga harus menunggu konfirmasi dari pihak perbankan. Proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu. Kami berusaha memberi update ke masyarakat secara berkala, tapi mereka kadang tidak sabar dan menghubungi lagi karena merasa bantuan sangat dibutuhkan di awal semester. Kami sebenarnya ingin cepat, tapi kewenangan kami terbatas.
Mengenai pengaduan teknis seperti kesalahan data atau dana yang belum masuk ke rekening, kendala apa yang biasanya membuat proses penyelesaiannya memakan waktu hingga berminggu-minggu, dan sejauh mana ketergantungan Ibu pada unit kerja lain atau pihak eksternal seperti perbankan dalam memvalidasi laporan tersebut?	Pengaduan jenis ini harus melalui tahapan verifikasi ulang yang melibatkan pihak sekolah, kelurahan, dan unit internal lain di lingkungan Dinas Pendidikan. Proses koordinasi lintas unit tersebut menyebabkan penyelesaian pengaduan tidak dapat dilakukan secara cepat. Kalau ada data yang salah, kami tidak bisa langsung memperbaiki tanpa persetujuan unit lain atau tanpa konfirmasi data rekening dari bank. Inilah yang sering membuat masyarakat merasa prosesnya lambat, padahal kami sedang dalam proses validasi agar tidak terjadi kesalahan kirim.
Dalam riset ini, responsivitas dinilai bukan hanya dari kecepatan menjawab, tapi juga keberhasilan menyelesaikan masalah. Bagaimana Ibu melihat tingkat kepuasan masyarakat sejauh ini, mengingat banyak orang tua yang berada dalam kondisi ekonomi sulit sangat berharap pada dana ini tepat waktu untuk keperluan sekolah anak mereka?	Kami menyadari bahwa bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, keterlambatan informasi atau dana adalah masalah besar. Kami mencoba untuk terus responsif dengan memberikan nomor kontak yang bisa dihubungi dan sistem <i>update</i> berkala. Namun, kami akui responsivitas kami belum sepenuhnya terintegrasi dengan fungsi eksekusi keuangan secara instan. Kami sering menjadi tempat tumpuan emosi orang tua siswa, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk tetap memberikan pelayanan yang tenang dan solutif.
Sejauh mana dukungan sistem digitalisasi pengaduan saat ini membantu tugas Ibu dalam memetakan jenis-jenis masalah yang paling sering muncul, dan apa saran Ibu agar sistem responsivitas ini bisa lebih cepat dalam mengeksekusi solusi keuangan bagi penerima manfaat?	Sistem pengaduan saat ini sudah membantu dalam mendokumentasikan masalah, tapi belum otomatis menyelesaikan masalah teknis bank. Harapan kami, ke depannya sistem helpdesk ini bisa langsung terhubung dengan <i>database</i> perbankan dan data kemiskinan secara <i>real-time</i> . Jadi, ketika ada

	keluhan data tidak cocok, kami bisa langsung tahu letak kesalahannya tanpa harus berkirim surat manual atau menunggu konfirmasi sehari-hari. Itu akan sangat meningkatkan kecepatan layanan kami kepada masyarakat.
Terakhir, apa pesan atau imbauan yang sering Ibu sampaikan kepada orang tua siswa yang merasa frustrasi dengan kendala administratif ini, agar mereka tetap memiliki kepercayaan terhadap komitmen Pemerintah Kota dalam membantu pendidikan anak-anak mereka?	Kami selalu sampaikan agar mereka tetap bersabar dan memastikan data di sekolah sudah benar-benar sesuai dengan KTP dan KK. Kami tegaskan bahwa dana tersebut hak mereka dan tidak akan hilang, hanya saja butuh waktu untuk verifikasi agar tepat sasaran. Kami ingin mereka tahu bahwa pemerintah kota tidak tinggal diam dan terus berusaha memperbaiki sistem agar di semester-semester berikutnya kendala serupa tidak terulang kembali.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN LSM KOTA TANGERANG

Narasumber : Yarmanto
 Jabatan : Aktivis Pendidikan LSM Lokal Kota Tangerang
 Hari/Tanggal : 30 Januari 2026
 Lokasi : Kota Tangerang

PERTANYAAN	JAWABAN
Sebagai aktivis yang konsern terhadap isu pendidikan di Kota Tangerang, bagaimana Bapak memandang ketepatan desain Program Tangerang Cerdas ini dalam menjawab akar permasalahan pendidikan di tingkat akar rumput, apakah skema bantuan tunai saat ini sudah menjadi jawaban yang komprehensif?	Program ini tepat, tapi menurut kami belum lengkap. Memberikan bantuan tunai jelas membantu anak-anak tetap bisa sekolah, tapi masalah pendidikan tidak hanya soal biaya. Misalnya, ada anak-anak yang tetap kesulitan mengikuti pelajaran karena kualitas guru rendah atau fasilitas sekolah terbatas. Sebaiknya program ini diintegrasikan dengan kebijakan non-finansial, seperti subsidi transportasi, perbaikan fasilitas belajar, dan program peningkatan kapasitas guru. Jadi, bantuan tunai adalah satu bagian dari sistem yang lebih besar, bukan solusi tunggal.
Oh baik, pak. Jika kita berbicara mengenai keberlanjutan atau <i>sustainability</i> pendidikan bagi siswa kurang mampu, sejauh mana Bapak melihat intervensi finansial ini mampu menjamin kualitas output pendidikan mereka, jika di sisi lain masalah fundamental seperti aksesibilitas dan fasilitas pendukung lainnya belum tersentuh secara merata oleh program ini?	Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketepatan program perlu dipandang secara holistik. Intervensi finansial mampu menyelesaikan masalah langsung terkait biaya pendidikan, tetapi untuk jangka panjang, perlu strategi yang lebih komprehensif yang mencakup kualitas pendidikan dan aksesibilitas. Hal ini penting agar tujuan program tidak hanya sekadar meringankan biaya, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan pendidikan secara menyeluruh. Tanpa itu, kita hanya membantu mereka "masuk" sekolah, tapi tidak menjamin mereka "berkualitas" setelah lulus.
Lalu, dalam pengamatan LSM di lapangan, seringkali ditemukan bahwa bantuan sosial sering kali hanya menjadi solusi jangka pendek. Menurut pandangan Bapak, bagaimana seharusnya Pemerintah Kota Tangerang menyusun integrasi kebijakan agar bantuan Tangerang Cerdas ini tidak hanya bersifat konsumtif untuk biaya sekolah, tetapi juga bersifat produktif bagi masa depan siswa?	Kami menyarankan adanya sinergi lintas sektoral. Jangan hanya Dinas Pendidikan yang bekerja, tapi juga harus melihat sisi aksesibilitasnya. Bantuan tunai adalah satu bagian dari sistem yang lebih besar. Kita butuh penguatan di kualitas gurunya juga. Jika gurunya tidak mampu mengajar dengan baik karena keterbatasan kapasitas, bantuan uang sebesar apapun tidak akan bisa mengangkat prestasi anak-anak tersebut. Kita butuh solusi yang

	menyentuh hulu dan hilir masalah pendidikan.
Tekait dengan mekanisme pengawasan publik, bagaimana Bapak menilai transparansi dan keterbukaan akses informasi mengenai penyaluran bantuan ini? Apakah LSM merasa dilibatkan atau memiliki ruang untuk memberikan masukan terhadap perbaikan data penerima yang seringkali dikeluhkan masyarakat?	Ruang pengawasan itu harus dibuka seluas-luasnya. Kami di LSM sering mendapat laporan dari warga soal ketidakadilan data, tapi proses untuk melakukan koreksi atau intervensi data itu sangat tertutup birokrasinya. Seharusnya ada forum rutin di mana masyarakat sipil bisa memberikan masukan terkait realitas di lapangan yang mungkin tidak tertangkap oleh DTKS atau sistem administrasi dinas. Transparansi bukan hanya soal publikasi angka, tapi soal sejauh mana pemerintah mau mendengar koreksi dari luar.

Lampiran. 2 Dokumentasi

No.	Foto Bersama Informan	Keterangan Informan
1.		Dr. Wahyudi Iskandar, S.STP., M.Si. (Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
2.		Eka Rachmat Hartawan, S.E (Kepala Bidang Perencanaan (Pelaksana Kebijakan) Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
3.		

		Mamik Isdiarti SKM,M.Si (Staf Seksi Bantuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
4.		Euis siti safaah,S.E (Staf Call Center / Helpdesk Program Dinas Pendidikan Kota Tangerang)

5.		Wessa Triawan, SE, M.Ec.Dev (Staf Bidang Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang)
6.		Juahiriyah, S.Pd (Guru SMP Negeri 5 Kota Tangerang)

Lampiran. 3 Surat Permohonan Izin Penelitian Dinas Pendidikan Kota Tangerang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 00351/UN7.F7/PP/II/2026

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dr. Wahyudi Iskandar, S.STP., M.Si.
Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3, Jl. Satria Sudirman No.1, Kelurahan
Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota
Tangerang, Banten 15111

Dalam rangka mempersiapkan penulisan Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Kepala Dinas

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : HILMA RAHMULIZA MAKSUM
Nomor Induk Mahasiswa : 14010122140219
Judul : ANALISIS EVALUASI PROGRAM TANGERANG CERDAS DI
KOTA TANGERANG : PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK
Alamat Rumah : Cipondoh Makmur Blok C6 No.4 Jl.Cendana 2 Cipondoh, Kota
Tangerang
Alamat Email : hilmarahmulizamaksum@students.undip.ac.id
Nomor Telepon : 082111546123

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 04 Februari 2026

Dekan

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003

Lampiran. 4 Surat Permohonan Izin Penelitian Dinas Pendidikan Kota Tangerang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 00358/UN7.F7/PP/II/2026
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Eka Rachmat Hartawan, S.E
Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3, Jl. Satria Sudirman No.1, Kelurahan
Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota
Tangerang, Banten 15111

Dalam rangka mempersiapkan penulisan Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Perencanaan (Pelaksana Kebijakan) Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : HILMA RAHMULIZA MAKSUM
Nomor Induk Mahasiswa : 14010122140219
Judul : ANALISIS EVALUASI PROGRAM TANGERANG CERDAS DI
KOTA TANGERANG : PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK
Alamat Rumah : Cipondoh Makmur Blok C6 No.4 Jl.Cendana 2 Cipondoh, Kota
Tangerang
Alamat Email : hilmarahmulizamaksum@students.undip.ac.id
Nomor Telepon : 082111546123

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 04 Februari 2026


Dekan
Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003

Lampiran. 5 Surat Permohonan Izin Penelitian Dinas Pendidikan Kota Tangerang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 00352/UN7.F7/PP/II/2026

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Mamik Isdiarti SKM,M.Si
Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3, Jl. Satria Sudirman No.1, Kelurahan
Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota
Tangerang, Banten 15111

Dalam rangka mempersiapkan penulisan Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Staf Seksi Bantuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : HILMA RAHMULIZA MAKSUM
Nomor Induk Mahasiswa : 14010122140219
Judul : ANALISIS EVALUASI PROGRAM TANGERANG CERDAS DI
KOTA TANGERANG : PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK
Alamat Rumah : Cipondoh Makmur Blok C6 No.4 Jl.Cendana 2 Cipondoh, Kota
Tangerang
Alamat Email : hilmarahmulizamaksum@students.undip.ac.id
Nomor Telepon : 082111546123

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 04 Februari 2026

Dekan

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003

Lampiran. 6 Surat Permohonan Izin Penelitian SMP Negeri 5 Kota Tangerang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 00353/UN7.F7/PP/II/2026

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Mohamad Isdarmanto, M.PL
Daan Mogot Rd No.82, RT.002/RW.014,
Sukaasih, Tangerang, Tangerang City, Banten
15111

Dalam rangka mempersiapkan penulisan Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Wakil Kepala Sekolah

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : HILMA RAHMULIZA MAKSUM
Nomor Induk Mahasiswa : 14010122140219
Judul : ANALISIS EVALUASI PROGRAM TANGERANG CERDAS DI
KOTA TANGERANG : PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK
Alamat Rumah : Cipondoh Makmur Blok C6 No.4 Jl.Cendana 2 Cipondoh, Kota
Tangerang
Alamat Email : hilmarahmulizamaksum@students.undip.ac.id
Nomor Telepon : 082111546123

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 04 Februari 2026


Dekan
Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003

Lampiran. 7 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dinas Pendidikan Kota Tangerang



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai III, Sukaasih, Tangerang 15111, Telepon (021) 55767074 Faksimile (021) 55776733
Pos-el dinas.pendidikan.kotang@gmail.com Laman <https://disdik.tangerangkota.go.id>

Tangerang, 9 Februari 2026

Nomor : B/57/000/II/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Selesai Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
di
Semarang

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Diponegoro nomor 01580/UN7.F7/PP/II/2026 tanggal 28 Januari 2026 tentang
Permohonan Izin Penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama : Hilma Rahmuliza Maksum
NIM : 14010122140219

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Pendidikan Kota Tangerang
dengan judul " Analisis Evaluasi Program Tangerang Cerdas di Kota Tangerang :
Perpektif Kebijakan Publik.

Demikian surat ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya, atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan



Dr. WAHYUDI ISKANDAR, S. STP, M. Si
NIP.197705281996121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).